

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN KEBERLANJUTAN KOTA

Bambang Deliyanto (deli@ecampus.ut.ac.id)
Sumartono (sumartono@ecampus.ut.ac.id)

PENGANTAR

Fenomena abad 21 ini mayoritas manusia akan meninggalkan lingkungan alam maupun pedesaan dan akan tinggal di kota-kota. Di Indonesia, diperkirakan tidak kurang dari 40% penduduk tinggal di kawasan perkotaan. Untuk pulau Jawa, populasi urban pada tahun 1998 adalah 54,6 juta jiwa. Pada tahun 2018 ini 146,9 juta jiwa dan pada tahun 2035 akan tumbuh 11,82% menjadi 167,3 juta jiwa (Anonim, 2018) atau hampir 3 kali lipat lebih besar dari angka 1998. Populasi Pulau Jawa pada 17 tahun mendatang (2035) setara dengan 54% jumlah penduduk Indonesia, yaitu sebanyak 305,65 juta jiwa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 2014) menyatakan, bahwa sebanyak 54% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Bahkan, jumlah tersebut akan terus meningkat menjadi 80% di tahun 2050. Tentu tingginya penduduk yang tinggal diperkotaan tidak lepas dari arus urbanisasi. Tingginya angka urbanisasi telah membuat kota-kota besar di Indonesia mengalami penurunan daya dukung. Oleh karena itu Indonesia ikut menyepakati program kota dan komunitas berkelanjutan yang menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang merupakan tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB.

SDGs selain untuk mencapai kota dan komunitas berkelanjutan, juga mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi. Termasuk di dalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial. SDGs juga dikenal sebagai *Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau "Transformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Konsep SDGs tersebut melanjutkan konsep

pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Berbeda dengan MDGs, kerangka kerja SDGs tidak membedakan antara negara-negara “maju” dan “berkembang”. Sebaliknya, tujuannya berlaku untuk semua negara.

Indonesia melalui Pemerintahan Pusat telah melakukan upaya sejak 1976 untuk meringankan tekanan penduduk terhadap DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 13 tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabodetabek. Agar menyerasikan perencanaan pengembangan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, selanjutnya disebut Jabotabek, dengan tujuan untuk membina pola permukiman penduduk dan penyebaran kesempatan kerja yang lebih merata. Kebijakan ini mendorong pengembangan kota dengan pola invasi (pembangunan kota baru) oleh Pemda DKI Jakarta dan melahirkan perumahan dan permukiman berskala besar di daerah yang bersinggungan dengan Jakarta. Jumlah perumahan dan pemukiman meliputi 130 di Kabupaten dan Kodya Bogor, 107 di Kabupaten dan Kodya Bekasi, dan 152 di Kabupaten dan Kodya Tangerang. Pembangunan kawasan permukiman di pinggiran Jakarta berhasil menekan pertumbuhan penduduk Jakarta yang turun menjadi 2,4%, namun meningkatkan pertumbuhan penduduk Botabek menjadi 4,9% (Bappeda DKI Jakarta, 1997). Kebijakan pengembangan kota dengan pola invasi ini menyumbang permasalahan yang khas di wilayah pinggiran Jakarta. Sebagai contoh antara lain: kemacetan lalu lintas di jalan arteri yang menghubungkan inti kota Jakarta, belum siapnya daerah Botabek menyiapkan sarana dan prasarana permukiman sehingga menimbulkan ketidaknyamanan warga serta terganggunya fungsi ekosistem sehingga dapat menghambat keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Berangkat dari pemahaman bahwa ekosistem adalah contoh sistem berkelanjutan yang terbaik yang kita kenal saat ini, maka diperlukan pembahasan konsep pembangunan permukiman berkelanjutan, baik itu keberlanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Tulisan ini membahas

tentang adanya hubungan antara pengembangan kawasan permukiman dengan keberlanjutan atau tidaknya suatu kota.

PEMBAHASAN

Beberapa Teori Permukiman dan Kota Berkelanjutan

Kawasan permukiman adalah sebidang lahan yang diperuntukkan bagi pengembangan permukiman (Direktorat Jendral Cipta Karya, 1997). Kawasan menurut UU RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang merupakan bagian dari wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional, yang terdiri atas kawasan lindung dan budidaya. **Kawasan lindung** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan yang dimaksud dengan **kawasan budidaya** adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, seperti hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan industri, kawasan berikat, kawasan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, kawasan pertahanan keamanan, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan permukiman.

Permukiman sendiri menurut UU RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan perikehidupan dan penghidupan. Tempat tinggal yang dimaksud disini adalah tempat tinggal untuk seseorang atau satu keluarga yang terdiri atas rumah dan pekarangan. Oleh karena itu salah satu komponen permukiman adalah perumahan.

Perumahan sendiri mempunyai arti kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian (alami, buatan dan sosial) yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, dalam hal ini

adalah sarana dan prasarana lingkungan buatan (Direktorat Jendral Cipta Karya, 1997). Kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan inilah yang membedakan antara permukiman di perdesaan dan perkotaan. Kota tidak akan berfungsi baik tanpa ada sarana dan prasarana yang lengkap. Kota yang dimaksud disini adalah suatu daerah yang berpenduduk relatif besar dan pada umumnya bersifat non agraris, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualis (Direktorat Jendral Cipta Karya, 1997).

Keberlanjutan secara sederhana dapat dipahami sebagai bertahan hidup atau belangsung secara lama. Keberlanjutan dalam konteks lingkungan hidup selain perspektif jangka waktu yang lama juga mempertimbangkan sumberdaya alam bumi. Menurut Salim (2005), keberlanjutan hendaknya dikaitkan dengan keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, baik itu lingkungan alami, buatan atau sosial budaya.

1. Pengembangan Permukiman dan Teori Perencanaan Kota

Pengembangan permukiman dalam skala besar tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan suatu kota, karena pada hakekatnya kota adalah tempat terkonsentrasinya permukiman penduduk dalam skala besar. Hal ini didukung pendapat Kirmanto (2002) yang menyatakan bahwa pembangunan kota termasuk di dalamnya pengembangan kawasan permukiman atau pembangunan permukiman. Dengan memperhatikan pengertian permukiman, perumahan dan kota tersebut maka untuk merencanakan pembangunan permukiman tidak lepas akan pembahasan tentang teori perencanaan kota. Teori dan praktek perencanaan kota atau permukiman modern berurusan dengan membentuk dan menata lingkungan fisik buatan dan sosial manusia melalui desain maupun kebijakan yang rasional. Perencanaan kota ini merupakan respons terhadap buruk dan kacanya lingkungan buatan fisik dan sosial kota-kota yang *unliveable*, yaitu antara lain lingkungan yang tidak sehat, tidak aman, tidak nyaman, tidak tersedianya lapangan pekerjaan dan perumahan yang layak, tuntutan akan kualitas hidup tetap tidak berubah. Pendekatan perencanaan kota senantiasa mengalami perubahan. Dari sejarah perencanaan kota, kota

dapat diamati sebagai: taman, karya seni, perluasan arsitektur, drama sosial, sistem dan sebagainya.

Pada awalnya, perencanaan kota modern muncul karena gerakan reformasi kota sebagai reaksi terhadap teror fisik dan sosial yang terjadi di kota-kota industri. Dari beberapa literatur ditunjukkan bahwa berbagai gerakan atau aliran pada masa ini adalah: gerakan taman kota (*parks movement*) yang dipelopori oleh Fredrick law Olmsted, "*city beautiful*" dan "*civic art*", kota taman (*garden city*) yang diusulkan pertama-tama oleh Ebenezer Howard, diikuti oleh Patrick Geddes, kemudian dipopulerkan oleh Leis Mumford di Amerika. Pada tahun 1933 CIAM (Kongres Internasional Arsitektur Modern) menetapkan Charter of Athena, yaitu manifesto yang mengecam sakitnya kota-kota industri dan meletakkan dasar-dasar persyaratan fisik bagi lingkungan kota yang indah, manusiawi dan sehat (Uguy, 2001).

Setelah perang dunia berakhir dan keadaan mulai stabil, terjadi perubahan ide-ide perencanaan yang signifikan. Pada tahun 1960-an muncul dua macam teori perencanaan (yang sebelumnya perencanaan dianggap *common sense*), yaitu: cara pandang sistem dan cara pandang rasional. Keduanya dikritik sebagai meletakkan rencana dan keputusan perencanaan lingkungan kota yang ingin diciptakan, tanpa memasukkan aspek manusia, walaupun pendekatan ini sangat mendominasi dunia perencanaan kota. Kritik juga dimunculkan oleh Davidoff (1965) tentang pentingnya muatan nilai dan aspek politik dari perencanaan melalui publikasinya "*Advocacy and Pluralism Planning*".

2. Pola Pertumbuhan dan Perkembangan Kota

Sejalan dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan aktifitas manusia, pola tata guna tanah yang merupakan wujud adaptasi manusia terhadap lingkungannya pun berkembang. Dikenal tiga model utama yang menjelaskan struktur keseluruhan kota, yaitu: *cincin konsentris* (Burgess), *Sektor* (Hoyt), dan *inti berganda* (Harris dan Ullman) (Catanese & Snyder 1979).

Tiga model yang menjelaskan struktur kota ini merupakan hasil analisis dengan pendekatan ekologis (*Ecological Approach*) pertama kali dikembangkan oleh masyarakat ilmiah di *Chicago School of Urban* antara 1916-1940, yang diilhami oleh proses persaingan alami yang terjadi pada masyarakat tumbuhan dan binatang (Yunus, 2000). Dalam masyarakat binatang dan tumbuhan ini terlihat adanya interrelasi antara berbagai jenis spesies dan lingkungan, dan proses interrelasi ini telah menimbulkan perimbangan kualitas dan kuantitas spesies yang kemudian pada jangka waktu tertentu akan membentuk pola persebaran spesies yang khas. Ide ini mendorong pengembangan "*human ecology*" yang kemudian, diartikan sebagai studi hubungan spasial dan temporal dari manusia yang dipengaruhi oleh kekuatan, selektif, distributif dan akomodatif dari lingkungan (Kenzi 1925 dalam Yunus, 2000).

Menurut Park (1936) dalam Yunus (2000), masyarakat manusia dalam membentuk permukimannya terorganisir ke dalam 2 tingkat yaitu:

- (1) *Natural/biotic level*
- (2) *Novel/cultural level*

Secara novel atau *cultural level* dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1980) yang menguraikan tentang asal mula dan perkembangan kota yang berhubungan dengan tiga tingkatan organisasi manusia, yaitu masyarakat tradisional (*folk society*), masyarakat pra industri (*civilized pre industrial society "feudal" society*) dan masyarakat modern industrial (*modern industrial society*). Dikatakan bahwa kota-kota industri mulai muncul pada level masyarakat industri, yang mempunyai ciri surplus makanan, domestikasi binatang, spesialisasi, struktur kelas, peralatan metalurgi, tulisan, dan energi selain otot.

Pada tingkat natural, proses-proses ekologis yang terjadi pada masyarakat manusia mirip dengan apa yang terjadi pada masyarakat tumbuhan dan binatang. Proses ini (perhatikan ciri makhluk hidup) antara lain (Koentjaraningrat (1980):

- (1) Membutuhkan tempat untuk tinggal
- (2) Mengembangkan keturunannya
- (3) Membutuhkan tempat untuk mencari makan

Pada manusia proses tersebut sangat terlihat pada suatu permukiman atau kota melalui sistem sosial yang ada dan kemudian menghasilkan pola-pola diferensiasi sosial dan penggunaan lahan. Pada tingkat novel atau kultural proses interaksi yang terjadi semakin kompleks karena manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk hidup saja tetapi sebagai makhluk hidup yang berbudaya dan beragama yang mempunyai kekuatan mencipta, berkarya dan berkarya dalam menjalankan tugas yang dibebankan Tuhan dalam mengelola bumi.

Pada kenyataannya jarang sekali perkembangan permukiman atau kota mengikuti sepenuhnya salah satu pola struktur kota tersebut. Zona-zona konsentris berubah sesuai berjalannya waktu menjadi sektor-sektor ketika jalan raya memperpanjang pola-pola tata guna tanah. Inti-inti baru juga berkembang karena pembangunan permukiman baru pada tata guna tanah. Selama dekade terakhir ini, banyak kota-kota dunia makin berkembang dengan pola menyebar. Di Amerika Serikat ini dikenal dengan istilah *urban sprawl* atau di Indonesia dikenal dengan daerah pinggiran kota (*peri urban*). Ada tiga macam pola penyebaran yang berbeda, yaitu (1) perkembangan kontinu berkepadatan rendah, (2) perkembangan pita (*ribbon development*), dan (3) perkembangan lompat katak (*leap frog development*) (Farmer & Gibb dalam Catanese & Snyder, 1979).

Pola perkembangan ini melahirkan komunitas-komunitas sub-urban (dan ex-urban) yang kemudian berkembang pula dengan pola yang menyebar. Meskipun perkembangan permukiman hasil dari perencanaan yang sistemik yang sistematis baik secara ekonomi, politik dan sosial, namun pola penyebaran ini sering digambarkan "kacau dan tak terencana" (*chaos and unplanned*), sehingga keberlanjutan permukiman terganggu. Kondisi ini juga dialami oleh Indonesia baik Jakarta dengan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), maupun Surabaya dengan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).

Dua faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kota, pertama adalah adanya organisasi sosial khusus yang ditopang oleh kekuatan politik untuk mengelola surplus pertanian dan mengorganisasikan tenaga kerja. Kedua

adalah adanya lingkungan yang baik, berupa tanah yang subur dan suplai air untuk pertanian dan permukiman kota (Uguy, 2001). Lingkungan seperti ini ada di lembah-lembah sungai di wilayah lintang tengah dan daratan aluvial yang luas. Kota atau permukiman pertama yang dikenal dalam peradaban manusia di lembah sungai Efrat dan Tigris (Mesopotamia), Nil, Indus dan Sungai Kuning.

3. Konsep Keberlanjutan dan Aplikasinya pada Pembangunan Permukiman.

Secara epistemologis, istilah "berkelanjutan" (*sustainable*) berasal dari kata Latin *sub* dan *tenere*, yang berarti *to uphold* atau *to keep*, mengandung makna menopang atau menjaga. Pemakaiannya secara konseptual, dapat ditelusuri pada konsep '*sustainable yield*' yaitu '*renewable resources managed so as not to be depleted overtime*' (Miller, 1975), seperti yang dikembangkan ahli-ahli kehutanan Jerman, yang kemudian juga mempengaruhi Aldo Leopold dalam pengembangan gagasannya tentang etika bumi (*land ethic*) yang memperkenalkan kepada etika lingkungan akademik suatu pendekatan baru yaitu ekosentrisme (Leopold dalam Armstrong & Botzler, 1993).

Penggunaan konsep '*sustainable*' secara spesifik pertama kali dapat ditemukan dalam buku '*Limits to Growth*' oleh Donella Meadows dan peneliti lain dari MIT (Meadows, Meadows, Randers, & Behrens III, 1972). Secara sederhana keberlanjutan dapat dipahami sebagai bertahan hidup atau berlangsung lama. *A sustainable system is one which survives or persists* (Costanza & Patten, 1995). Dalam biologi berarti mencegah kerusakan dan hidup untuk bertahan dan memproduksi. Dalam ekonomi berarti mencegah kerusakan dan kolaps, melindungi terhadap instabilitas dan diskontinuitas. Pada dasarnya keberlanjutan mempertimbangkan *temporality* (kesementaraan) dan khususnya *longevity* (umur panjang).

Dalam penggunaannya ada kesulitan dalam mendefinisikan keberlanjutan karena adanya ketidakpastian ilmiah dan ketidakpastian sosial ekonomi (Bey, 2005), ketidakpastian ilmiah karena adanya keterbatasan

pengetahuan dan prediksi sistem-sistem fisik maupun natural, ketidakpastian sosial ekonomi karena adanya keterbatasan pengetahuan dan prediksi sistem-sistem sosial dan infrastruktur. Misalnya bila suatu sistem dikatakan telah mencapai keberlanjutan, tidak berarti lama hidup bisa tak terbatas (*an infinite life span*), tetapi suatu masa hidup yang konsisten dengan skala ruang dan waktu tertentu. Jadi sistem berkelanjutan dalam konteks ini adalah mencapai masa harapan hidup sepenuhnya (sel, organisme, populasi, ekosistem, ekosfer, planet mempunyai masa harapan hidup yang berbeda-beda).

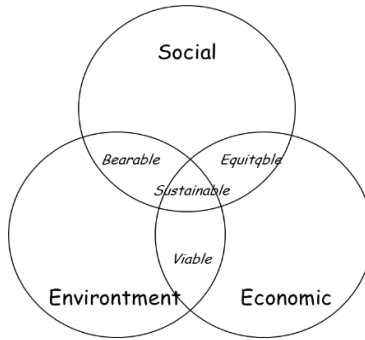
Sejak Laporan komisi Brundtland (1987) *Our Common Future* diluncurkan, dan KTT Bumi (1991) dicanangkan, panggilan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan bergema secara internasional dan masuk ke berbagai bidang dan lapisan masyarakat. Rumusan komisi untuk pembangunan berkelanjutan adalah "Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Meskipun rumusan WCED tersebut banyak dikritik, karena antara lain dinilai antroposentris dan memunculkan konsep kebutuhan yang sulit dibatasi, namun telah merangsang pengembangan pemikiran dan penerapan lebih jauh sehubungan dengan interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya.

Keberlanjutan dalam bidang permukiman juga telah diamanatkan dalam Agenda 21 yang dicanangkan di Rio de Janeiro tahun 1992 yang mengamanatkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan di sektor permukiman, dituangkan pada Agenda Habitat I. Hasil konferensi tersebut adalah kesepakatan masyarakat internasional tentang kerangka kerja pembangunan permukiman manusia berwawasan lingkungan yang memberi perhatian pada masalah sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Juga Konferensi PBB mengenai Permukiman di Istanbul pada 1996, menghasilkan Agenda Habitat II yang menjadi acuan dalam penanganan lingkungan binaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah RI kemudian merumuskan dalam Rencana Tindak Agenda Habitat II yang disampaikan pada Konferensi Habitat II+5 di New York pada 2001 (Perserikatan Bangsa-bangsa, 2017). Rumusan isu pembangunan

berkelanjutan dan kelestarian lingkungan ini mendorong untuk segera menerapkan pembangunan lingkungan binaan yang bertumpu pada masyarakat (*Community Based Development/CBD*).

Mukadimah Agenda Habitat II 1996, merekomendasikan dua tema, yaitu tempat tinggal yang layak bagi semua orang dan pembangunan permukiman yang berkelanjutan di dunia yang 'meng-kota'. Tema pertama membawa komitmen untuk mencapai tempat tinggal yang layak bagi semua orang, khususnya kelompok miskin yang kurang diperhatikan baik dipertanian maupun perdesaan, melalui pendekatan pemberdayaan pada pembangunan dan peningkatan tempat tinggal dalam lingkungan yang sehat. Tema kedua, pengembangan permukiman berkelanjutan yaitu memadukan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Masyarakat didudukkan sebagai pelaku utama pembangunan baik pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan fisiknya maupun dalam pelestarian lingkungan hidup (Perserikatan Bangsa-bangsa, 2017).

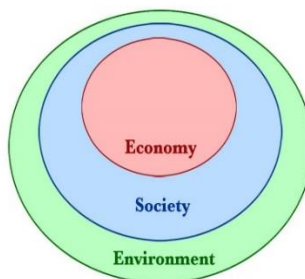
Dalam tulisan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Wardhono, 2012), berbagai pandangan tersebut mengisyaratkan pentingnya suatu dialog dalam memaknai keberlanjutan, yaitu untuk memposisikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai tiga pilar utama dalam sistem kehidupan sebagaimana dinyatakan oleh *Brundtland Commission*. Jika dimensi ekonomi dan sosial dianggap dapat mewakili dan merepresentasikan tujuan dan kegiatan pembangunan (*development*), maka keduanya perlu memiliki keterkaitan dengan dimensi lingkungan, termasuk sumberdaya alam. Pada hakekatnya keterkaitan (*overlapping*) ketiga pilar tidak sepenuhnya bersifat *mutually exclusive*, namun mampu menciptakan perkuatan satu dengan lainnya (*mutually reinforcing*) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1 berikut (Wardhono, 2012).



Sumber: Wardhono (2012)

Gambar 1. Interaksi Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Lebih lanjut dikatakan (Wardhono, 2012) bahwa Jonathon Porritt, seorang ekolog Inggris menganggap bahwa "ekonomi adalah subsistem kehidupan sosial, dan kehidupan sosial merupakan subsistem biosfer atau sistem total kehidupan di bumi. Tidak satu subsistem pun mampu melampaui kapasitas sistem biosfer". Oleh karena itu Jonathon Porritt tidak sependapat dengan pola ketekaitan ketiga pilar tersebut, dan meyakini bahwa terdapat batas *ultimate* biosfer dalam menopang kehidupan sosial dan ekonomi manusia di bumi sebagaimana digambarkan Porritt seperti pada Gambar 2 berikut.

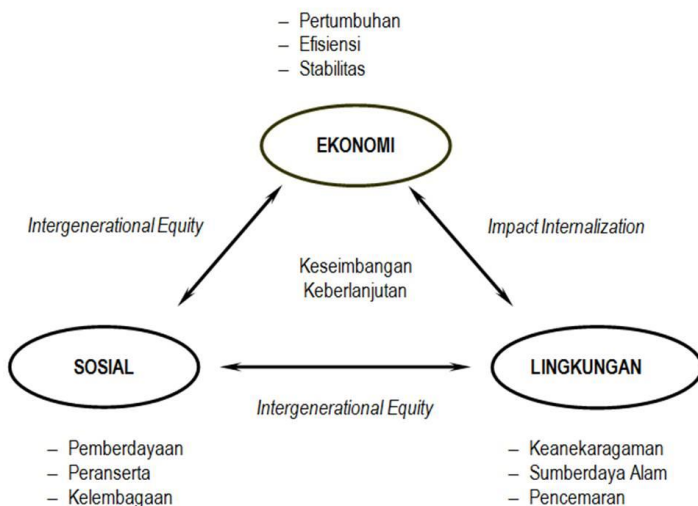


Sumber: Porritt dalam Wardhono (2012)

Gambar 2. Pilar Lingkungan (Biosfer) Membatasi Pilar Ekonomi dan Sosial

Namun pendapat Porrit (dalam Wardhono, 2012) disanggah, bahwa menempatkan keberlanjutan lingkungan diatas kepentingan ekonomi dan sosial dalam kehidupan manusia sulit diwujudkan oleh adanya kendala finansial, teknologi, dan kapasitas sumberdaya manusia.

Dari ulasan-ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga pilar disepakati sebagai dimensi keberlanjutan, namun keterkaitan ketiganya perlu diintegrasikan dalam posisi tidak absolut, oleh karena dalam kehidupan manusia dihadapkan pada keterbatasan dan kendala. Konsep keberlanjutan yang dipahami sebagai integrasi tiga pilar keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan saling memperkuat. Seperti yang dirangkum oleh Munasinghe (2007) yang mengelaborasi elemen pokok ketiga pilar, yakni pilar ekonomi oleh elemen pertumbuhan, efisiensi, dan stabilitas; pilar sosial oleh elemen pemberdayaan, peranserta, dan kelembagaan; dan pilar lingkungan oleh elemen keanekaragaman, sumberdaya alam, dan pencemaran seperti Gambar 3 berikut.



Sumber: Munasinghe (2007)

Gambar 3. Elemen Pokok Pembangunan Berkelanjutan

4. Kota dan Komunitas Berkelanjutan

Batasan pengertian tentang pembangunan berkelanjutan tersebut berkembang terus, dengan berbagai argumentasinya termasuk pembangunan kota berkelanjutan. Dalam URBAN 21 Conference di Berlin pada bulan Juli 2000 telah disepakati rumusan sebagai berikut: *“Sustainable urban development essentially means improving the quality of life in a city, including ecological, cultural, political, institutional, and economic components without leaving a burden on the future generations”* (Budihardjo, 2010).

Pengertian tersebut menurut Budihardjo (2010) dinilai cukup komprehensif, karena telah mencakup segala aspek. Kendati demikian, sebagaimana yang dilontarkan oleh Shakespeare *“What is a city but its people”*, menurut Budihardjo (2010) rumusan tersebut perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang keberlanjutan dari komunitas manusia atau warga kotanya. *Institute for Sustainable Communities* memberi batasan pengertian tentang *sustainable urban communities* sebagai warga kota yang memiliki rasa tempat (*sense of place*) dengan landasan visi dan misi yang ditetapkan dan dianut bersama oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pihak swasta, badan-badan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kalangan kampus, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, bahkan juga kelompok yang kurang beruntung (*diffabled* atau *disadvantaged*). Komunitas perkotaan semacam itu selalu akan mengawal perkembangan kotanya melalui wacana dan debat publik yang inklusif dan konstruktif, dilandasi semangat kebesamaan, kesukarelaan, kemandirian, dengan penekanan pada pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan segenap warga, tanpa kecuali. Dari kedua batasan pengertian tentang pembangunan kota dan komunitas kota berkelanjutan tersebut, nampak bahwa aspek budaya dan tata kelola menempati posisi yang penting, tidak kalah dibanding dengan aspek tata ruang, ekonomi dan ekologi yang serba terukur dan kasat mata. Budihardjo (2010), menyatakan dalam bidang arsitektur dan perkotaan pun berlaku adagium *“Di balik setiap bangunan dan kota yang Anda lihat, terdapat manusia dengan pernik-pernik budayanya yang acapkali tidak Anda lihat”*.

Mengenai prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan, hampir serupa dengan batasan pengertiannya, selalu berkembang terus. Semula, William McDonough memperkenalkan prinsip yang disebutnya dengan '*Triple Top Line*' yaitu *Environment*, *Employment*, dan *Equity* yang dilengkapi dengan '*Triple Bottom Line*' yaitu *People*, *Planet*, dan *Profits* (Yudelson, 2007 dalam Budihardjo. 2010).

PENUTUP

Peningkatan kepadatan penduduk yang begitu cepat sangat mempengaruhi meningkatnya intensitas penggunaan lahan khususnya untuk permukiman. Tanpa perencanaan permukiman yang baik keberlanjutan kota akan terganggu akibat terganggunya ekosistem pendukung kota. Konsep keberlanjutan dipahami sebagai integrasi tiga pilar, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan saling memperkuat. Dengan demikian, perumusan kota yang berkelanjutan perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang keberlanjutan dari komunitas manusia atau warga kotanya seperti aspek budaya dan tata kelola. Konsep pembangunan permukiman berkelanjutan ini, baik itu keberlanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologi dapat menunjang terlaksananya tujuan SDGs.

REFERENSI

- Anonim. (2018). Penduduk Jawa bakal mencapai 167 Juta jiwa. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/06/2035-penduduk-jawa-bakal-mencapai-167-juta-jiwa> pada April 2018.
- Armstrong, S. & Botzler, R.G. (eds). (1993). *Environment ethics divergence and convergence*. New York: McGraw-Hill.
- Bappeda DKI Jakarta. (1997). *Laporan Interim: Pekerjaan studi pemaduserasian tata ruang Jabotabek*. Jakarta: Bappeda DKI.
- Bey, A. (2005). *Integrasi Lingkungan dan Pembangunan*, Materi Kuliah Doktoral Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Brundtland, G.H. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. Diakses September 2018 dari <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>.
- Budihardjo, E. (2010). Pembangunan kota berkelanjutan dalam persepektif sosial budaya dan tata kelola. *Workshop Pelestarian Fungsi Barito untuk mendukung Pembangunan Kota Berkelanjutan*, Banjarmasin 25 September 2010.
- Catanese,, A.J. & Snyder, J.C. (eds). (1979). *Introduction to urban planning*. NewYork: McGraw-Hill Book Co.
- Costanza & Patten. (1995). Defining and predicting sustainability. *Elsevier Journal Ecological Economics*, 15, 193-196.
- Davidoff. (1965). Advocacy and pluralism planning. *Journal of the American Institute of Planners*. Diakses melalui http://urbanpolicy.net/wp-content/uploads/2012/11/Davidoff_1965_Advocacy-and-pluralism-in-planning.pdf pada 15 September 2018.

- Direktorat Jendral Cipta Karya (1997). *Kamus Tata Ruang, Edisi 1*. Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Kirmanto, D. (2002). Pembangunan permukiman berkelanjutan. *Seminar Peduli Banjir "Forest"*. Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1980). *Pengantar Ilmu Anthropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Meadows, D.H., Meadows D.I., Randers, J., & Behrens III, W.W. (1972). *The limits to growth*. Diakses melalui <http://www.ask-force.org/web/Global-Warming/Meadows-Limits-to-Growth-Short-1972.pdf>
- Miller, G.T. (1975). *Living in the environment: Concept, problems, and alternatives*. Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Munasinghe, M. (2007). *Sustainable development triangle, 'Sustainable Development'*, edited by Cleveland, C. J.
- Perserikatan Bangsa-bangsa. (2017). *Agenda baru perkotaan*. Diakses melalui <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Bahasa-Indonesia.pdf>
- Salim, E. (2005). Pembangunan berkelanjutan. *Seminar FMIPA Universitas Terbuka Tangerang Selatan*.
- Uguy, M.J.H. (2001). *Pengembangan lingkungan peri-urban dan keberlanjutan kota* (Disertasi). Program Doktor PSL Universitas Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

United Nations. (2014). *World urbanization prospects, the 2014 revision*. Diakses melalui <https://esa.un.org/unpd/wup/publications/files/wup2014-highlights.pdf>

Wardhono, F. (2012). *Pembangunan kota berkelanjutan*. Diakses melalui <https://fitriwardhono.wordpress.com/2012/04/14/pembangunan-kota-berkelanjutan/> pada 6 September 2018.

Yunus, H.S. (2000). *Struktur tata ruang kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.